



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **I NYOMAN PARWATA**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **915507**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.956.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/277 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/212 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.100.000
3. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 246.100.000
4. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 246.100.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 120.100.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.100.000
7. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 344.200.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/150 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 155.900.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 121.900.000



2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.400.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
10.700.000
4. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
18.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	79.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	27.572.839
F. HARTA LAINNYA	Rp.	120.000.000
Sub Total	Rp.	9.339.372.839

III. HUTANG Rp. 291.554.300

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.047.818.539

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.